

STRATEGI OPTIMALISASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA PLESUNGAN BOJONEGORO

Oleh :

Heny Suhindarno¹⁾, Mochtar Setijohadi²⁾, Lita Tri Cahyaningrum³⁾

^{1,2,3} Universitas Bojonegoro

¹email: hsuhindarno@gmail.com

²email: mochtarsetijohadi99@gmail.com

³email: Litatricahya14@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 14 Februari 2026

Revisi, 25 Mei 2026

Diterima, 28 Mei 2026

Publish, 29 Mei 2026

Kata Kunci :

E-Government,
Good Governance,
Strategi Optimalisasi.



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Meskipun pemerintah daerah telah menerapkan *e-government* melalui Sistem Informasi Desa (SID) sebagai upaya mewujudkan *good governance*, pelaksanaannya di Desa Plesungan masih menghadapi kendala. Permasalahan empiris yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Kondisi tersebut menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan strategi optimalisasi *e-government* yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* melalui Sistem Informasi Desa (SID) telah meningkatkan efektivitas pelayanan publik, namun masih terkendala keterbatasan SDM, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi optimalisasi yang diperlukan meliputi peningkatan kompetensi aparatur, penguatan infrastruktur digital.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Nama: Heny Suhindarno

Afiliasi: Universitas Bojonegoro

Email: hsuhindarno@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan *electronic government* (*e-government*), yaitu penggunaan teknologi digital dalam aktivitas pemerintahan untuk

meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi.

Di Indonesia, komitmen pemerintah terhadap pengembangan *e-government* telah ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini menempatkan *e-government* sebagai instrumen penting untuk mewujudkan *good governance*, yang berprinsip pada transparansi,

akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat (Firdausijah & Priatna, 2020).

Secara empiris, penerapan e-government di Indonesia masih menghadapi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, yang dikenal sebagai daerah pelopor keterbukaan informasi publik. Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menginisiasi program Open Government Partnership (OGP) sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik. Namun, penelitian Suprastiyo (2019) menemukan bahwa implementasi OGP di Bojonegoro belum berjalan optimal; dari 419 desa yang ada, hanya 50 desa yang menerapkan prinsip keterbukaan informasi, sementara sisanya masih dalam kategori “menuju terbuka.” Hambatan utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya komunikasi birokrasi, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa.

Penelitian Pria et al (2024) di Kecamatan Gondang menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam pelayanan publik memang mulai diimplementasikan, namun belum sepenuhnya berjalan efektif. Aparatur pemerintah menghadapi kendala berupa keterbatasan kemampuan digital, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap layanan berbasis daring. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Musthofa et al (2024) di Kecamatan Malo, di mana pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai wujud implementasi e-government masih belum optimal. Hambatan seperti minimnya pelatihan operator, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan jaringan internet menghambat terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

Selain tantangan di tingkat aparatur dan infrastruktur, aspek sosial masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan e-government. Penelitian (Marfu'ah et al., 2024) mengenai digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bojonegoro belum siap untuk beradaptasi dengan sistem digital. Faktor ketidaksiapan ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi dari pemerintah, dan keterbatasan perangkat teknologi seperti smartphone. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem dan kebijakan, tetapi juga pada kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Temuan empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal e-government dengan kondisi penerapannya di lapangan. Secara konsep, e-government seharusnya mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan e-government di Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi berbagai

kendala teknis, struktural, dan sosial. Kurangnya integrasi antarprogram digital, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, serta minimnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi penerapan e-government dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah tersebut.

Dari perspektif akademik, kajian-kajian sebelumnya umumnya masih bersifat deskriptif dan terbatas pada bidang tertentu. Beberapa penelitian hanya menyoroti aspek keterbukaan informasi, pelayanan publik di tingkat kecamatan, penerapan sistem informasi desa, maupun kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi layanan. Belum terdapat penelitian yang secara menyeluruh dan terpadu membahas strategi optimalisasi e-government di Bojonegoro dengan pendekatan lintas sektor yang mampu memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kabupaten.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya merumuskan strategi optimalisasi e-government yang efektif dan dapat diterapkan secara nyata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Strategi yang dihasilkan diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi pedoman praktis bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam strategi optimalisasi *e-government* dalam konteks penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan dan memahami makna di balik fakta empiris yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini berfokus pada penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi aktual penerapan *e-government* serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat merumuskan strategi optimalisasi yang relevan dan aplikatif untuk memperkuat prinsip *good governance* di daerah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis terhadap temuan lapangan,

kebijakan yang ada, serta pandangan para pemangku kepentingan terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi e-government dalam mewujudkan good governance di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator Sistem Informasi Desa (SID), perangkat desa bagian pelayanan, dan perwakilan masyarakat pengguna layanan.

Berdasarkan hasil wawancara, Desa Plesungan telah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai bentuk implementasi e-government dalam pelayanan administrasi publik. Sistem ini digunakan untuk pengelolaan data kependudukan, pembuatan surat-menyurat, serta penyampaian informasi kegiatan desa. Penerapan sistem digital tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi (Najich Alfayn, 2022). Kepala Desa menyampaikan bahwa penerapan SID mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Transformasi digital dalam pemerintahan desa dinilai mampu mempercepat proses administrasi dan memperbaiki sistem pengarsipan data (Najich Alfayn, 2022).

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa SID membantu dalam proses pengelolaan administrasi dan dokumentasi desa. Sistem digital mempermudah proses rekapitulasi laporan dan meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola desa terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi (Musthofa et al., 2024). Operator SID menyampaikan bahwa sistem ini mempercepat pelayanan administrasi, khususnya dalam pembuatan surat keterangan dan pengolahan data kependudukan. Namun demikian, keterbatasan jaringan internet dan kurangnya pelatihan teknis menjadi hambatan dalam optimalisasi sistem. Keberhasilan e-government sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia (Febria Nurita, 2016).

Perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih lebih memilih pelayanan tatap muka karena belum terbiasa dengan sistem digital. Rendahnya literasi digital masyarakat merupakan salah satu tantangan dalam implementasi pelayanan publik berbasis teknologi (Marfu'ah et al., 2024).

Pembahasan

Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi e-government dalam mewujudkan good governance di Desa Plesungan berdasarkan lima indikator utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Kelima indikator tersebut merupakan prinsip good governance menurut UNDP yang relevan untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam konteks digitalisasi pelayanan publik.

1. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam good governance yang menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks implementasi e-government, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi pelayanan publik secara digital, termasuk prosedur administrasi, persyaratan dokumen, dan informasi kegiatan desa. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Plesungan telah memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai media penyampaian informasi administrasi dan kegiatan pemerintahan. Keberadaan sistem digital ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa harus selalu datang ke kantor desa. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan keterbukaan informasi dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yaya dan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi desa mampu meningkatkan transparansi pemerintahan apabila informasi dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, Wijaya (2021) menegaskan bahwa e-government berperan dalam meminimalkan praktik birokrasi tertutup karena setiap proses terdokumentasi secara sistematis dalam sistem digital. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa pembaruan informasi dalam sistem belum dilakukan secara rutin. Beberapa informasi belum diperbarui secara berkala sehingga potensi transparansi belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan temuan Suprastiyo (2019) yang menyatakan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat daerah masih menghadapi kendala budaya birokrasi dan keterbatasan sumber daya manusia.

Dengan demikian, meskipun SID telah meningkatkan transparansi di Desa Plesungan, diperlukan komitmen berkelanjutan dalam memperbarui dan mengelola informasi secara konsisten agar prinsip transparansi benar-benar terwujud.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa atas setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam implementasi e-government, akuntabilitas dapat dilihat dari adanya sistem dokumentasi digital yang memungkinkan proses pelayanan ditelusuri kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SID di Desa

Plesungan memungkinkan setiap pelayanan administrasi tercatat secara sistematis. Dokumentasi digital ini memudahkan aparat desa dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelayanan. Selain itu, sistem digital juga mengurangi potensi kesalahan pencatatan manual.

Temuan ini mendukung penelitian Wijaya (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-government mampu meningkatkan akuntabilitas publik melalui integrasi sistem informasi yang transparan dan terdokumentasi. Demikian pula, Najich Alfayn (2022) menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintahan desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat pertanggungjawaban aparat kepada masyarakat.

Namun demikian, Desa Plesungan belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital yang terintegrasi secara menyeluruh. Evaluasi kinerja masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terhubung dengan sistem SID. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih memerlukan penguatan pada aspek integrasi dan pengawasan internal. Hal ini sejalan dengan pendapat Musthofa et al. (2024) yang menekankan pentingnya sistem evaluasi berbasis teknologi untuk memastikan keberlanjutan tata kelola digital. Oleh karena itu, implementasi e-government telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, namun masih memerlukan strategi penguatan sistem pengawasan berbasis digital agar akuntabilitas dapat berjalan secara optimal (Najich Alfayn, 2022).

3. Efektivitas

Efektivitas mengacu pada kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan pelayanan publik secara optimal. Dalam konteks e-government, efektivitas dapat diukur dari kecepatan pelayanan, ketepatan data, dan peningkatan kualitas layanan administrasi. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan SID telah mempercepat proses pembuatan surat keterangan dan pengolahan data kependudukan. Aparatur desa tidak lagi melakukan pencatatan berulang karena data telah tersimpan dalam sistem. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelayanan dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwibin Kannapadang et al. (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik apabila didukung oleh komitmen aparat dan konsistensi implementasi. Selain itu, Febria Nurita (2016) juga menjelaskan bahwa e-government berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan melalui percepatan proses administrasi. Namun demikian, efektivitas belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan digital dan lebih memilih pelayanan tatap muka. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya dipengaruhi oleh sistem teknologi, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat sebagai pengguna

layanan. Temuan ini mendukung penelitian Marfu'ah et al. (2024) yang menyatakan bahwa literasi digital masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Dengan demikian, efektivitas implementasi e-government di Desa Plesungan telah mengalami peningkatan, tetapi masih memerlukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar manfaat sistem dapat dirasakan secara menyeluruh (Marfu'ah et al., 2024).

4. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal dalam proses pelayanan publik. Penerapan SID di Desa Plesungan telah mengurangi penggunaan dokumen manual dan mempercepat pengarsipan administrasi. Digitalisasi memungkinkan penghematan waktu dan tenaga kerja dalam proses pelayanan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Febria Nurita (2016) yang menyatakan bahwa e-government meningkatkan efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan prosedur administrasi. Musthofa et al. (2024) juga menegaskan bahwa optimalisasi Sistem Informasi Desa dapat meningkatkan efisiensi kerja aparat apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan operator SID, gangguan jaringan internet dan keterbatasan perangkat teknologi masih menjadi kendala dalam menjaga stabilitas sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital. Tanpa dukungan jaringan yang stabil, pelayanan berbasis sistem dapat terhambat. Oleh karena itu, meskipun e-government telah meningkatkan efisiensi pelayanan di Desa Plesungan, penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas teknis aparat menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan sistem (Musthofa et al., 2024).

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam implementasi e-government, responsivitas dapat dilihat dari kecepatan aparat desa dalam memproses permohonan layanan dan memberikan tanggapan atas pertanyaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SID membantu mempercepat proses pelayanan administrasi, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama. Aparatur desa juga dapat langsung mengakses data yang dibutuhkan tanpa mencari arsip manual.

Temuan ini mendukung penelitian Najich Alfayn (2022) yang menyatakan bahwa e-government meningkatkan responsivitas pemerintah melalui percepatan alur komunikasi dan pelayanan. Selain itu, Dwibin Kannapadang et al. (2025) menjelaskan bahwa sistem digital memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, responsivitas masih perlu ditingkatkan melalui penyediaan fitur pengaduan online dan mekanisme umpan balik digital yang terintegrasi dalam sistem SID. Tanpa adanya saluran komunikasi dua arah yang optimal, potensi e-government dalam meningkatkan responsivitas belum sepenuhnya tercapai (Marfu'ah et al., 2024). Dengan demikian, implementasi e-government di Desa Plesungan telah berkontribusi terhadap peningkatan responsivitas pelayanan, tetapi masih memerlukan pengembangan fitur interaktif agar pelayanan menjadi lebih partisipatif dan responsif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi optimalisasi e-government dalam mewujudkan good governance di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi

Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Plesungan telah meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Informasi pelayanan administrasi dan kegiatan desa mulai disampaikan melalui sistem digital sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi dengan lebih mudah. Namun, pembaruan informasi belum dilakukan secara rutin sehingga transparansi belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, transparansi telah mengalami peningkatan, tetapi masih memerlukan komitmen pengelolaan informasi yang lebih konsisten.

2. Akuntabilitas

Penggunaan SID memungkinkan setiap proses pelayanan terdokumentasi secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi diperlukan untuk mendukung akuntabilitas yang lebih optimal.

3. Efektivitas

Implementasi e-government melalui SID terbukti meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi. Proses pembuatan surat dan pengolahan data kependudukan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Meskipun demikian, efektivitas belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme pelayanan digital dan lebih memilih pelayanan tatap muka.

4. Efisiensi

Digitalisasi administrasi desa telah mengurangi penggunaan dokumen manual serta mempercepat proses pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga kerja. Namun, keterbatasan

infrastruktur seperti gangguan jaringan internet dan keterbatasan perangkat teknologi menjadi kendala dalam menjaga stabilitas sistem.

5. Responsivitas

Penerapan SID membantu aparatur desa dalam merespons permohonan layanan secara lebih cepat. Akses data yang tersimpan dalam sistem mempercepat proses pelayanan. Akan tetapi, fitur interaktif seperti pengaduan online dan mekanisme umpan balik digital belum sepenuhnya tersedia, sehingga responsivitas belum optimal dalam konteks komunikasi dua arah.

5. REFERENSI

- Dwibin Kannapadang, Munawaroh, S., & Purwanto, S. A. (2025). Optimizing E-Government for Enhanced Transparency and Accountability in Local Governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 4203–4212. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3962>
- Febria Nurita, R. (2016). PENERAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT DALAM PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA MALANG. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(Desember), 238–246. *kebijakan, +Section+editor, +6.+Taqwaty+F+(58-63)*. (n.d.).
- Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK KETIDAKSIAPAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI BOJONEGORO. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2).
- Musthofa, A., Lukito, C., Suhindarno, H., Studi, P., & Publik, A. (n.d.). Optimalisasi Penggunaan Website Sistem Informasi Desa di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 211–221.
- Najich Alfayn, M. A. (2022). From E-Government to Good Governance: Examining the Impact of Digitalization on Public Service Delivery in Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(2), 19–40. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.14873>
- Nurkartika, N. (2025). E-Government Transformasi Menuju Good Governance. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)* (Vol. 3). <https://isora.safar.id/index.php/isora>
- Paselle, E., Indarto, K., & Rande, S. (n.d.). *Digital Governance in Public Administration: Enhancing Transparency Through E-Government Platforms*. <https://thejoas.com/index.php/>
- Publik di Kantor Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Vico Tri Okta Pria, P., Novianto, H., Miftahul Huda, M., & Studi Administrasi Publik, P. (n.d.). Dukungan E-Government dalam *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 222–233.

- Suprastiyo, A. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP DI KABUPATEN BOJONEGORO. In *JIAN* (Vol. 3, Issue 1).
- Wijaya, J. H. (2021). GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(2).
<https://doi.org/10.21580/jpw.v3i2.12127>
- Yaya, R., & Author, C. (2025). Pengaruh Implementasi E-Government dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Good Government Governance sebagai Variabel Pemoderasi. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 10(1), 69–81.
<http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>